



PERTEMUAN TRILATERAL JEPANG – AS DAN KORSEL

Noh Kyu-duk, Perwakilann Khusus Urusan Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri Korea, menghadiri pertemuan trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, membahas Korea Utara di Tokyo, Jepang, Selasa (14/9).

IDN/ANTARA

AS Siap Berdialog dengan Korut

Korut telah sukses melakukan uji coba rudal jarak jauh.

WASHINGTON(IM) - Amerika Serikat (AS) siap untuk berdialog dengan Korea Utara, meskipun Pyongyang telah melakukan uji coba rudal jelajah jarak jauh baru selama akhir pekan lalu. Wakil Sekretaris Pers Utama Karine Jean-Pierre mengatakan, posisi AS terhadap Korea Utara tidak berubah.

“Posisi kami tidak berubah ketika menyangkut Korea Utara, kami tetap siap untuk terlibat,” kata Jean-Pierre,

Selasa (14/9). Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan, Korea Utara telah melakukan uji coba rudal jelajah jarak jauh pada akhir pekan lalu. KCNA mengatakan rudal itu adalah senjata strategis yang sangat penting, dan terbang melesat sejauh 1.500 km sebelum mengenai target mereka dan jatuh ke perairan teritorial negara itu. Rudal jelajah Korea Utara

biasanya tidak terlalu menjadi favorit ketimbang rudal balistik, karena mereka tidak secara eksplisit dilarang di bawah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, para analis mengatakan, rudal jelajah bisa memiliki sistem berkemampuan nuklir.

Tidak diketahui apakah Korea Utara telah menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk membangun hulu ledak pada rudal jelajah. Tetapi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan, pengembangan bom yang lebih kecil adalah tujuan utama.

Komando Indo-Pasifik mi-

liter AS (INDOPACOM) mengatakan, kegiatan uji coba itu menyeroi fokus berkelanjutan Korea Utara pada pengembangan program militernya dan ancaman yang ditimbulkan terhadap negara tetangganya dan komunitas internasional. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, keterlibatan diplomatik adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

“Kami telah melihat laporan ini, dan saya pikir ini keterlibatan diplomatik adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian berkelanjutan dan denuklirisasi di Semenanjung

Korea,” ujar Dujarric. Kepala negosiator nuklir dari Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang akan bertemu pada pekan ini di Tokyo. Mereka akan membahas upaya dalam membujuk Korea Utara untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden terbuka untuk melakukan diplomasi dan dialog terkait denuklirisasi. Tetapi pemerintah AS tidak menunjukkan kesediaan untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara. Utusan AS untuk Korea Utara, Sung Kim, mengatakan, dia siap bertemu dengan pejabat Korea Utara. • tom

Pendatang Internasional Dikarantina Lima Hari di Saudi

RIYADH(IM) - Kerajaan Arab Saudi akan mengurangi karantina wajib bagi para pelancong ke kerajaan. Penumpang dari penerbangan internasional akan diharuskan melakukan karantina hanya selama lima hari. Dari aturan sebelumnya, Otonitas Umum Penerbangan Sipil (GACA) disebut telah memotong masa karantina ini sebanyak dua hari. Hal ini disampaikan dalam surat edaran

resmi untuk semua bandara di Kerajaan, Senin (13/9) lalu. Dilansir di The National News, Selasa (14/9), GACA juga meminta pihak berwenang untuk memperbarui prosedur kedatangan bagi penduduk dan pelancong dari negara-negara dalam daftar hijau yang sesuai. Aturan tersebut berlaku bagi mereka yang telah mendapat vaksinasi yang disetujui untuk digunakan di Kerajaan, baik satu maupun dosis penuh.

Semua kedatangan juga harus memberikan bukti tes PCR negatif Covid-19, yang diambil dalam waktu 72 jam sebelum perjalanan. Tes Covid-19 juga akan dilakukan dalam waktu 24 jam setelah kedatangan mereka, sementara tes lainnya harus dilakukan setelah lima hari. Masa karantina akan otomatis berakhir berdasarkan otomatis negatif dan akan diperbarui statusnya di aplikasi ‘Tawakkalna’ Covid-19.

Kasus Covid-19 di Arab Saudi telah menurun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Negara itu memberlakukan denda berat dan hukuman penjara bagi mereka yang tidak mematuhi prosedur kesehatan dan keselamatan. Terbaru, Kerajaan Saudi melaporkan 75 kasus Covid-19 baru dan enam kematian, Senin (13/9). Arab Saudi telah menyumbangkan 20 juta riyal untuk

membeli vaksin Covid-19, bagi negara-negara anggota yang kurang berkembang di Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pusat Bantuan Raja Salman juga mengumumkan Kerajaan Saudi sejauh ini telah berkontribusi pada lebih dari 40 proyek di seluruh dunia untuk memerangi virus corona, dengan biaya sekitar 800 juta dolar AS. • ans

AS akan Tinjau Kembali Hubungan dengan Pakistan

WASHINGTON(IM) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan audiensi publik pertama di Kongres untuk membahas Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa, Selasa (14/9). Dalam audiensi tersebut, Blinken mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Pakistan memiliki beberapa kepentingan yang bertentangan dengan AS.

“Ini (Pakistan) adalah salah satu yang terlibat menyembunyikan anggota Taliban. Mereka adalah salah satu yang juga terlibat dalam berbagai titik kerja sama dengan kami dalam kontraterorisme,” kata Blinken.

Dalam audiensi itu, anggota parlemen bertanya kepada Blinken apakah sudah waktunya bagi Washington untuk menilai kembali hubungannya dengan Pakistan. Blinken kemudian mengatakan pemerintah akan segera melakukannya.

“Ini adalah salah satu hal yang akan kita lihat dalam beberapa hari, dan minggu ke depan. Peran yang telah dimainkan Pakistan selama 20 tahun terakhir, tetapi juga peran yang ingin kita lihat di tahun-tahun mendatang dan apa yang diperlukan untuk melakukan itu,” kata Blinken.

Pakistan memiliki hubungan yang dekat dengan Taliban. Pakistan dituntut mendukung kelompok itu saat mereka memerangi pemerintahan Afghanistan yang didukung AS selama 20 tahun. Tuduhan tersebut dibantah oleh Islamabad.

Pakistan juga dianggap sebagai salah satu dari dua negara, setelah Qatar, yang memiliki pengaruh paling besar atas Taliban. Pakistan menjadi tempat pelarian pemimpin senior Taliban setelah invasi pimpinan AS ke Afghanistan pada 2001.

Penasihat Keamanan Nasional (NSA) Pakistan Moeed Yusuf pada Kamis (9/9) menepis

tuduhan Pakistan memperluas dukungan kepada Taliban di Panjshir. Dalam wawancara dengan CNN, Yusuf mengatakan, tuduhan tersebut tidak masuk akal dan tidak berdasar. “Itu tidak masuk akal,” ujar Yusuf, dilansir The Dawn, Jumat (10/9).

NSA menyatakan “proyek Afghanistan” gagal karena masalah internal negara itu. Beberapa di antaranya karena pemerintahan yang korup. Namun menurut Yusuf, dunia justru melihat Pakistan sebagai kambing hitam.

“Ini adalah pengkambinghitaman oleh pemerintah sebelumnya di Kabul yang sayangnya masyarakat internasional mulai percaya, karena mereka tidak ingin membicarakan kegagalan mereka sendiri,” kata Yusuf.

Dalam wawancara dengan CNN, Yusuf juga menepis tuduhan drone Pakistan membantu Taliban untuk melakukan serangan di Panjshir. Kabar tersebut ditayangkan oleh saluran berita India.

Yusuf mengatakan media India telah menyebarkan berita hoaks. Dia menunjukkan kertas yang berisi gambar tangkapan layar dari saluran berita India yang menayangkan video drone Pakistan di Panjshir. “Ini adalah media arus utama India yang menunjukkan sebuah jet Amerika terbang di atas Wales di Inggris, dan menampilkan seolah Pakistan melakukan sesuatu di Panjshir,” kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, India telah menghabiskan jutaan dolar untuk menciptakan jaringan berita palsu melawan Pakistan. Gambar yang ditunjukkan oleh Yusuf dibagikan oleh beberapa pengguna Twitter, yang mengklaim gambar itu adalah jet Angkatan Udara Pakistan yang ditembak jatuh oleh pasukan perlawanan di Panjshir. Namun, sebuah cek fakta yang ditemukan oleh Dawn dan jurnalisme independen menunjukkan gambar tersebut sebenarnya berasal dari kejadian 2018 di AS. • gul

18 Batang Emas dan 9 Juta Uang Dolar AS Ditemukan di Rumah Mantan Wapres Afghanistan

KABUL(IM) - Kelompok militan Taliban menemukan uang tunai sekitar 9 juta dolar Amerika Serikat (AS) dan 18 emas batangan di rumah milik mantan Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh yang telah menyatakan dirinya sebagai Presiden Afghanistan.

Seperti yang dilaporkan kantor berita negara itu, Khaama Press pada hari Senin waktu setempat.

Dalam video yang telah disiarkan sebelumnya di media sosial, menunjukkan gerilyawan Taliban sedang mendemonstrasikan aset yang ditemukan di kediaman Saleh.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (13/9), sebuah sumber yang tergabung dalam kelompok militan itu mengkonfirmasi bahwa ‘sejumlah besar uang’ telah ditemukan di rumah Wakil Presiden era pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani itu.

Namun, baik Saleh maupun anggota perlawanan anti-Taliban belum memberikan komentar

terkait klaim tersebut. Perlu diketahui, Amrullah Saleh mengklaim kekuasaan dan pengalihan tugas Presiden pada 17 Agustus lalu, tidak lama setelah Taliban menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan.

Hal itu dilakukan Saleh karena Presiden Ashraf Ghani saat itu melarikan diri dan pemerintah yang didukung negara Barat pun dibubarkan.

Saleh telah menjabat sebagai Wakil Presiden negara itu sejak Februari 2020, ia juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pada periode 2018 hingga 2019 dan menjabat sebagai Kepala Direktorat Keamanan Nasional pada 2004 hingga 2010.

Pada 10 September lalu, sebuah sumber yang dekat dengan pasukan perlawanan mengatakan bahwa Taliban menyandera kemudian membunuh saudara laki-laki Saleh, yakni Rohullah Saleh.

Sebelumnya pada 15 Agustus lalu, Taliban memasuki Kabul dan secara otomatis

menyelesaikan pengambilalihan mereka atas Afghanistan. Namun saat itu hanya provinsi utara Panjshir yang tidak berhasil dikuasai dan tetap menjadi pusat perlawanan, hingga akhirnya jatuh pula pada 6 September lalu.

Keesokan harinya, Taliban pun mengumumkan susunan pemerintahan sementara versi mereka. Kabinet ini akan dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama pemerintahan Taliban pertama.

Menariknya, Akhund merupakan sosok yang masuk dalam daftar tokoh yang mendapatkan sanksi dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sejak 2001. Pasukan perlawanan anti-Taliban pun sejak saat itu bersumpah untuk mundur dari perang tersebut.

Sementara pemimpin mereka, Ahmad Massoud masih tetap optimis dan meminta warga Afghanistan untuk terus melakukan pemberontakan melawan Taliban. • tom

Malaysia Wajibkan Warga Isi Formulir Keluar-Masuk Negara

KUALA LUMPUR(IM) - Pemerintah Malaysia hingga saat ini masih mewajibkan warga negara dan warga asing yang ingin masuk atau keluar untuk mengisi formulir MyTravel guna mendapatkan persetujuan dari Departemen Imigrasi Malaysia. Hal itu disampaikan Dirjen Imigrasi Departemen Imigrasi Malaysia (JIM), Indera Khairul Dzaimcedi Putrajaya, Selasa (14/9).

Khairu mengemukakan hal itu menanggapi artikel salah satu media setempat yang berjudul “Travel pass menyebabkan delay atau kegagalan berangkat”. Media tersebut mengulas mengenai MyTravelPass (MTP) yang diyakini telah menyebabkan keterlambatan dalam urusan perjalanan keluar dan masuk negara. “Penulis juga mendakwa bahwa keperluan MTP tidak diinformasikan kepada umum,” katanya.

JIM ingin menjelaskan bahwa pada 7 Oktober 2020 Dirjen Imigrasi sudah menginformasikan kepada umum mengenai permohonan izin masuk dan keluar negara bagi warganegara Malaysia dan warganegara asing perlu melalui sistem MyTravelPass.

“Pengumuman ini telah mendapat liputan yang meluas media setempat dan media internasional. Sejak saat itu hingga hari ini kami senantiasa membuat informasi kepada umum melalui media massa dan media sosial,” katanya.

Mulai dari 7 Oktober 2020 hingga 10 September, sebanyak 356.510 permohonan telah diterima. Dari jumlah ini sebanyak 6.697 permohonan dibatalkan, 208.509 lulus dan 127.465 permohonan ditolak.

“Jumlah yang diproses pula ialah 13,000 permohonan yang diuruskan oleh tiga gugus tugas. Jumlah ini tidak pernah berkurang malahan meningkat setiap hari,” katanya.

Mereka menegaskan bahwa pengekangan MTP adalah selaras dengan pembatasan perjalanan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pengekangan MTP adalah langkah pencegahan penularan virus Covid-19 dan ini terbukti sejak Agustus 2021 kasus impor positif Covid-19 yang dicatat adalah kurang dari 0,4 persen saja daripada jumlah kasus keseluruhan Covid-19 di Malaysia. “Waktu masa proses permohonan terpaksa dinaikkan dari tujuh hari kepada 14 hari karena keperluan tambahan masa proses diperlukan disebabkan jumlah permohonan bertambah,” katanya.

Dia mengatakan ini merupakan rentetan daripada dampak pembukaan lebih banyak sektor ekonomi yang mengakibatkan jumlah business travellers meningkat. “Orang banyak dinasihati supaya senantiasa peka dan peduli dengan semua pengumuman dan peraturan-peraturan terkini pemerintah serta membuat pemeriksaan tentang prosedur berkaitan sebelum memutuskan perjalanan ke luar negara,” katanya.

Selain itu, semua syarat permohonan perlu difahami dan keperluan permohonan seperti lampiran dokumen perlu dipenuhi sebelum menghantar permohonan. “Penilaian teliti perlu dibuat bagi mengelakkan penularan kasus impor positif Covid-19 merembak masuk ke negara ini,” katanya. • gul

Sidang Kasus Korupsi Netanyahu Kembali Dilanjutkan

TEL AVIV(IM) - Persidangan kasus korupsi mantan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali dilanjutkan setelah tertunda tiga bulan. Selain korupsi, Netanyahu juga terjerat kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sidang tersebut adalah yang pertama diadakan sejak Netanyahu menjadi pemimpin oposisi dan yang kelima sejak penasihat hukum pemerintah, Avichai Mandelblit, mengajukan dakwaan terhadapnya pada Januari 2020.

Sesi persidangan pertama dan kedua Netanyahu diadakan pada bulan Mei dan Juli 2020. Sesi ketiga dan keempatnya diadakan pada bulan April dan Juni tahun ini. Jeda tiga bulan dalam persidangan datang menyusul permintaan jaks untuk lebih banyak waktu untuk menyerahkan semua bahan yang diperlukan.

Menurut laporan Times of Is-

rael, pengadilan sesi terbaru akan mendengarkan kesaksian mantan CEO situs berita Walla Israel, Ilan Yeshua. “Yeshua adalah saksi utama dalam Kasus 4000, di mana Netanyahu diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya ketika ia menjabat sebagai perdana menteri dan menteri komunikasi dari 2014 hingga 2017,” bunyi laporan Times of Israel, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (14/9).

Netanyahu dituduh menggunakan posisinya untuk secara tidak sah menguntungkan kepentingan bisnis Shaul Elovitch, pemegang saham pengendali perusahaan telekomunikasi Bezeq. Sebagai gantinya, Elovitch diduga memberi Netanyahu dan keluarganya liputan positif di situs web berita Walla milik Elovitch. Ini termasuk mengizinkan rekanan dan anggota keluarga Netanyahu untuk mendikte konten editorial dan kebijakan secara teratur. • ans



IDN/ANTARA



BLACK LIVES MATTER
Polisi menahan seorang pengunjung rasa yang mengikuti aksi protes Black Lives Matter di tengah Met Gala 2021 di Metropolitan Museum of Art di Kota New York, New York, Amerika Serikat, Senin (13/9).

PBB: Taliban Ingkari Janji, Masih Batasi Ruang Gerak Wanita

JENEWA(IM) - PBB menyatakan Taliban telah mengingkari janji mereka, termasuk soal penghormatan terhadap hak-hak wanita. Taliban dinilai masih sangat membatasi pergerakan wanita.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet menuturkan, penguasa Taliban Afghanistan telah mengingkari janji-janji publik tentang hak-hak, termasuk dengan memerintahkan perempuan untuk tinggal di rumah, menghalangi gadis remaja bersekolah dan melakukan pencarian mantan musuh mereka dari rumah ke rumah.

Bachelet mengatakan, Afghanistan berada dalam “fase baru dan berbahaya” sejak Taliban merebut kekuasaan bulan lalu, dengan banyak perempuan dan anggota komunitas etnis, dan agama sangat khawatir tentang perkembangan situasi di negara itu.

“Bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama tiga minggu terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik,” katanya, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/9).

Dia menyatakan kekewaannya pada komposisi pemerintahan Taliban. Ia juga mencatat tidak adanya pertemuan dan dominasinya oleh etnis Pashtun. Dirinya juga menunjuk pada janji lain yang dilanggar tentang pemberian amnesti kepada mantan pegawai negeri dan petugas keamanan yang terkait dengan pemerintah sebelumnya, dan melarang penggeledahan dari rumah ke rumah.

“PBB telah menerima banyak tuduhan penarikan terhadap mereka yang bekerja dengan perusahaan dan pasukan keamanan AS, sementara beberapa staf PBB telah melaporkan peningkatan serangan dan ancaman,” ujarnya.

“Tuduhan yang dapat dipercaya tentang pembunuhan balasan terhadap beberapa mantan anggota militer Afghanistan juga telah diterima,” sambungnya.

Bachelet menyerukan mekanisme untuk memantau hak-hak di Afghanistan. “Saya mengundang seruan saya kepada Dewan ini untuk mengambil tindakan berani dan kuat, sepadan dengan gawatnya krisis ini,” tukasnya. • gul



IDN/ANTARA

AKSI PROTES DI BANGKOK - THAILAND

Kembang api yang dilemparkan oleh pengunjung rasa anti pemerintah meledak di depan barisan polisi anti kerusuhan saat terjadi aksi protes di Bangkok, Thailand, Senin (13/9). Gambar diambil 13 September 2021.